
HAK KERJA UNTUK SEMUA

DISUSUN OLEH
TIM REDAKSI SUARA KITA



PENDAHULUAN

Saat tulisan ini dibuat, KataData.co.id mencatat bahwa Indonesia tengah mengalami deflasi secara berturut-turut selama lima bulan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, deflasi lima bulan terjadi akibat melemahnya permintaan barang dan jasa oleh publik secara berturut-turut. Deflasi kali ini menandakan masyarakat sedang menahan diri untuk tidak belanja.

Selain itu, ekonomi Indonesia memburuk karena beberapa hal seperti kenaikan upah pekerja terlalu kecil, efek suku bunga tinggi, serta lapangan kerja terbatas di sektor formal.

Belum lagi, Indonesia juga masih mengalami banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan juga peningkatan tarif PPN di awal tahun depan.

Hal-hal di atas menambah lapisan diskriminasi bagi kelompok ragam gender dan seksual untuk bisa bekerja di sektor formal,

Melalui editorial ini, Tim Redaksi Suara Kita mencoba untuk memaparkan kondisi sekaligus merefleksikan, serta mengajak semua pihak untuk ikut berpikir bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan terbuka untuk semua.

Wisesa Wirayuda
Media & Campaign
Suara Kita

**“TO DENY PEOPLE
THEIR HUMAN
RIGHTS IS TO
CHALLENGE THEIR
VERY HUMANITY.”**
NELSON MANDELA

HAK KERJA UNTUK SEMUA

Kelompok ragam gender dan seksual kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan formal atau kantoran akibat diskriminasi yang mereka alami, baik ketika hendak melamar pekerjaan ataupun saat sudah bekerja.

Berbagai bentuk stigma dan diskriminasi yang kerap dihadapi transpuan dalam mendapatkan pekerjaan formal memaksa mereka untuk bertahan hidup dengan bekerja pada sektor informal.

Banyak sektor yang bahkan hampir mustahil menerima kelompok ragam gender dan seksual untuk bekerja, misalnya sektor pemerintahan.

Menjalankan wirausaha di tengah perekonomian Indonesia yang masih belum stabil ini bisa menjadi solusi namun juga merupakan berisiko besar.

Bagi minoritas gender dan seksual, bukanlah hal yang mudah mendapatkan pekerjaan yang tidak hanya memberikan penghidupan layak, tetapi juga keamanan dan kenyamanan.

Meski begitu, di balik kendala tersebut, masih ada kesempatan berkarir seperti pada sektor pekerja sosial (NGO) atau pada isu-isu progresif seperti isu perempuan atau keberagaman beragama.

Di tengah menyempitnya ruang bekerja dan berekspresi di Indonesia, industri seni juga menjadi salah satu wadah yang aman bagi kawan-kawan transgender untuk mengekspresikan diri dan menyambung hidup dengan berprofesi sebagai penari, pelukis, koreografer, dan lainnya.

ADMINDUK SEBAGAI PINTU AWAL

Kepemilikan Adminduk seperti e-KTP bisa menjadi pintu awal akan keberlangsungan hidup kelompok ragam gender dan seksual. Dengan memiliki identitas, maka dengan begitu mereka tercatat sebagai warga negara dan bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Melalui e-KTP, kelompok ragam gender dan seksual bisa mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik, hak politiknya, dan juga akses pendidikan yang nantinya bisa menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan.

Maka dari itu, perlu adanya kesetaraan dalam proses pengurusan Adminduk, dengan begitu kita bisa mulai berbicara soal kesetaraan dalam hak bekerja bagi semua golongan.



Seperti yang kita ketahui bersama, hak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak telah diatur dalam konstitusi RI, pada pasal 27 (2) UUD 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Hak bekerja juga diatur dalam peraturan turunan UU No.13/2013 Tentang Ketenagakerjaan dan diperbarui melalui pengesahan UU No.11/2020 Tentang Cipta Kerja/Omnibus Law.

Sebagian besar kelompok transgender hidup sendiri tanpa keluarga dan putus pendidikan formal pada usia anak, tidak memiliki identitas (E-KTP/KK).

Dampaknya, sebagian besar transgender terutama lansia mengalami kemiskinan ekstrim tanpa akses jaminan sosial dan tentu saja hal ini berdampak merugikan bagi pembangunan negara.

Pendampingan kepemilikan E-KTP dan jaminan kesehatan serta sosial bagi transpuan telah dilakukan oleh Suara Kita sejak berdiri pada 2007. Kemudian sepanjang 2018-2021 Suara Kita telah bekerjasama dengan para pelaku usaha untuk mengadakan sejumlah diskusi untuk peluang menciptakan lingkungan kerja inklusif bagi kelompok rentan dan marginal.

Semangat inklusi dan afirmasi kelompok rentan yang digaungkan oleh sektor pemerintah dan sektor swasta sering kali tidak mencakup kelompok minoritas gender dan seksual dalam pembahasannya, sehingga tidak ada kebijakan yang bisa melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.

PENUTUP

Menjawab tantangan ekonomi di Indonesia saat ini, Perkumpulan Suara Kita terus berinovasi salah satunya adalah melakukan pendataan yang dilakukan kepada Anggota dan Calon Anggota Suara Kita pada tanggal 11 September 2024 terkait seberapa banyak dari mereka yang memiliki unit usaha kolektif atau pribadi.

Hasil dari pendataan tersebut kemudian menunjukkan setidaknya ada 12 unit usaha dalam berbagai skala, bentuk, dan tantangan yang dihadapi. Mayoritas unit usaha yang mereka jalankan adalah usaha perorangan dan setidaknya dua di antaranya adalah usaha kelompok. Selain itu, jenis usaha mereka pun juga beragam, seperti perdagangan, jasa konsultan, musisi, les privat, tekstil, dan transportasi.

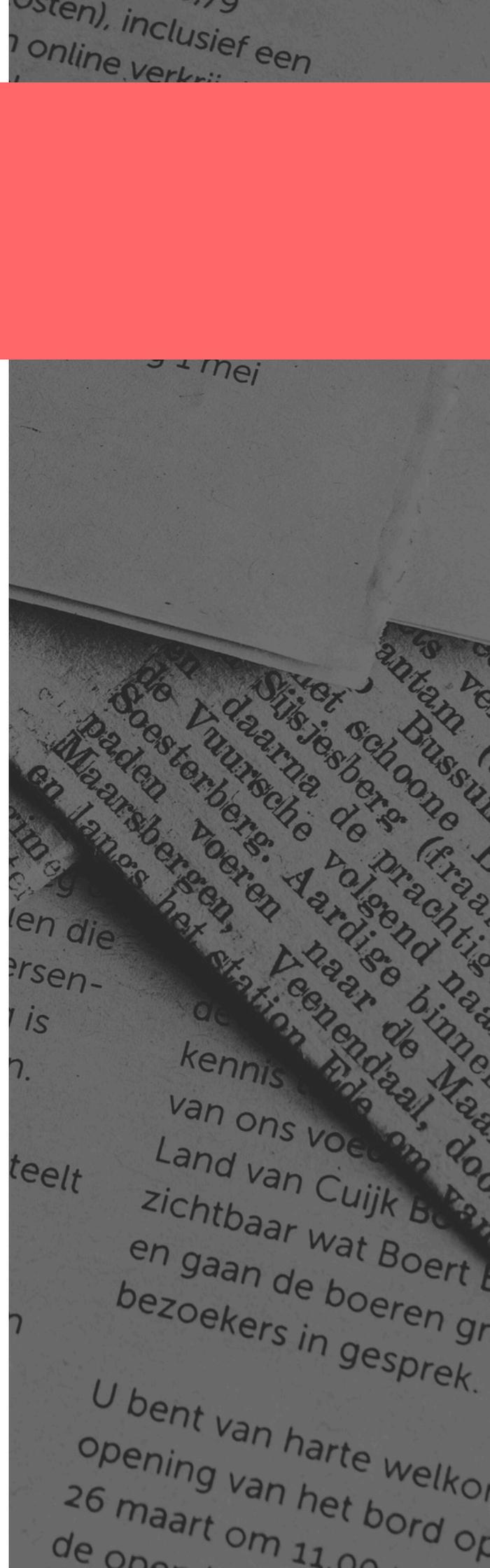
Hampir semua dari unit-unit usaha tersebut aktif menggunakan media sosial sebagai media utama mereka dalam berwirausaha, baik itu media sosial publik seperti Instagram dan Facebook ataupun yang lebih privat seperti WhatsApp.

Memang ada banyak solusi yang bisa kita jalankan bersama, namun secara fundamental, masih perlu adanya perubahan kebijakan yang lebih setara,

Karena hak untuk bebas memilih pekerjaan serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak konstitusi warga yang dijamin oleh negara.

Selamat Tahun Baru 2025,
Salam PPN 12%!

TIM REDAKSI SUARA KITA



TIM REDAKSI SUARA KITA



WISESA
JURNALIS



LENA
JURNALIS



BIMO
ILUSTRATOR



HERLANGGA
EDITOR

**"JOURNALISM IS PRINTING WHAT
SOMEONE ELSE DOES NOT WANT PRINTED.
EVERYTHING ELSE IS PUBLIC RELATIONS"**

GEORGE ORWELL



2024